

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses pembangunan berawal dari tahap perencanaan yang menjadi landasan sekaligus pemandu arah pembangunan guna mencapai tujuannya. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yakni menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Disamping itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan melewati beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Grobogan. Tahap ini dilakukan dengan:
 - a. membentuk Tim Penyusun Renja Kecamatan Grobogan;

- b. melaksanakan orientasi mengenai Renja untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renja Kecamatan Grobogan;
 - c. menyusun jadwal pelaksanaan sebagai panduan kerja; dan
 - d. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renja Kecamatan Grobogan.
2. Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Kecamatan Grobogan.
Pada tahap ini dilakukan analisis gambaran pelayanan Kecamatan Grobogan dan mengevaluasi capaian Renja Kecamatan Grobogan tahun yang lalu.
3. Penyusunan rancangan Rencana Kerja Kecamatan Grobogan.
Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan rancangan awal Renja Kecamatan Grobogan, yang mengacu pada rancangan awal RKPD Kabupaten Grobogan. Penyempurnaan tersebut mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran.
4. Pelaksanaan Forum Lintas Sektoral.
Tahap ini merupakan koordinasi antar Unit Kerja yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Rencana Kerja Kecamatan Grobogan.
5. Perumusan rancangan akhir Rencana Kerja Kecamatan Grobogan.
Tahap ini dilakukan dalam rangka mempertajam rumusan program, kegiatan dan pagu indikatif. Rancangan akhir Renja Kecamatan Grobogan disusun dengan sistematika :
 - I. Pendahuluan
 - II. Hasil evaluasi Renja Tahun lalu
 - III. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
 - IV. Rencana kerja dan pendanaan
 - V. Penutup
6. Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Grobogan.
Rancangan akhir Rencana Kerja disampaikan oleh Bappeda Kabupaten Grobogan kepada Bupati Grobogan melalui Sekretaris

Daerah Kabupaten Grobogan untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati Grobogan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Grobogan Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6).

1.3. Maksud dan Tujuan

- Maksud
Rancangan Awal Renja Kecamatan Grobogan disusun sebagai

dokumen awal yang selanjutnya akan disempurnakan lagi menjadi rancangan renja dan renja yang menjadi pedoman dan arah bagi Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode satu tahun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten dan berpedoman pada Renstra Kecamatan Grobogan.

- Tujuan

Rancangan Awal Renja Kecamatan Grobogan disusun agar tujuan dan sasaran Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan tahun 2024 dapat dicapai.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- a.1. Latar Belakang
- a.2. Landasan Hukum
- a.3. Maksud dan Tujuan
- a.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022

Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan pada struktur anggarannya memiliki 6 program dan 13 kegiatan serta 25 Sub kegiatan, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrenbang Kecamatan)
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - 1) Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1) Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - 1) Subkegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan
 - 2) Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman

dan Ketertiban Umum

- 1) Subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;
 - 1) Subkegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
 - 1) Subkegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- 2) Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 3) Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Subkegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - 7) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 3) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Capaian kinerja program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA
PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT
DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2022
KECAMATAN GROBOGAN KABUPATEN GROBOGAN

No	Kode	Program/Kegiatan	Satuan	TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA HINGGA 31/12/2021				TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA HINGGA 31/12/2022						REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN RENSTRA HINGGA 31/12/2022				Pelaksana
				Target Kinerja Capaian (Renstra SKPD) Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2021		Target Kinerja Capaian Program Renja SKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Capaian Program Renja SKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Pelaksanaan SKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tujuan - Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan			Nilai IKM	79,70	20,961,849,134	97,09	2,609,506,952	100	3,864,089,864	93,41	3,609,613,513	100	93.41	100	4,325,489,423	100	83,45	
Sasaran-1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat																		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100	18,505,790,134	100	2,141,670,952	100	3,405,385,864	100	3,152,715,513	100	92.58	100	3,827,363,423	100	82.37	Camat
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	15,155,313,134	100	1,448,211,373	100	2,678,417,864	100	2,431,036,334	100	90.76	100	3,181,023,423	100	76.42	Sekcam
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	15,155,313,134	14	1,448,211,373	14	2,678,417,864	12	2,431,036,334	86	90.76	14	3,181,023,423	86	76.42	Sekcam
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	387,467,000	100	35,864,000	100	71,667,000	100	71,667,000	100	100.00	100	78,950,000	100	90.78	Sekcam
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel	250	151,328,000	50	30,922,000	50	26,528,000	48	26,528,000	96	100.00	50	31,200,000	96	85.03	Sekcam
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	150	236,139,000	30	4,942,000	30	45,139,000	30	45,139,000	100	100.00	30	47,750,000	100	94.53	Sekcam
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	1,705,226,000	100	348.462.200	100	355,477,000	100	352,530,000	100	99.17	100	344,900,000	100	102.21	Sekcam

No	Kode	Program/Kegiatan	Satuan	TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA HINGGA 31/12/2021				TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA HINGGA 31/12/2022						REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN RENSTRA HINGGA 31/12/2022				Pelaksana
				Target Kinerja Capaian (Renstra SKPD) Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2021		Target Kinerja Capaian Program Renja SKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Capaian Program Renja SKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Pelaksanaan SKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	60	84,000,000	1	18,500,000	12	10,000,000	12	10,000,000	100	100.00	12	18,500,000	100	54.05	Sekcam
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Unit	15	131,730,000	8	28,748,000	3	15,730,000	3	15,730,000	100	100.00	3	29,000,000	100	54.24	Sekcam
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	60	601,260,000	1	119,943,000	12	121,260,000	12	121,145,000	100	99.91	12	120,000,000	100	100.95	Sekcam
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	60	74.000,000	1	14,999,200	12	14,000,000	12	14,000,000	100	100.00	12	15,000,000	100	93.33	Sekcam
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	60	42,000,000	1	8,400,000	12	8,400,000	12	8,400,000	100	100.00	12	8,400,000	100	100.00	Sekcam
		Penyediaan Bahan/Material	Bulan	60	260.000.000	1	51,897,000	12	60,174,000	12	60,155,000	100	99.97	12	50,000,000	100	120.31	Sekcam
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	60	512,236,000	1	105,975,000	12	125,913,000	12	123,100,000	100	97.77	12	104,000,000	100	118.37	Sekcam
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	500	172,489,000	100	75.008.000	100	20,489,000	100	20,489,000	100	100.00	100	21,000,000	100	97.57	Camat
		Pengadaan Mebel	-	8	68,000,000	4	16,737,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Camat
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	10	104,489,000	4	58,271,000	2	20,489,000	2	20,489,000	100	100.00	2	21,000,000	100	97.57	Camat
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	500	692,550,000	100	130.685.379	100	180,550,000	100	178,208,179	100	98.70	100	128,000,000	100	139.23	Sekcam
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	60	285,000,000	1	56,420,000	12	57,000,000	12	56,085,000	100	98.39	12	57,000,000	100	98.39	Sekcam
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	60	100,000,000	1	20,702,879	12	32,000,000	12	31,203,179	100	97.51	12	17,000,000	100	183.55	Sekcam

No	Kode	Program/Kegiatan	Satuan	TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA HINGGA 31/12/2021				TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA HINGGA 31/12/2022						REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN RENSTRA HINGGA 31/12/2022				Pelaksana
				Target Kinerja Capaian (Renstra SKPD) Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2021		Target Kinerja Capaian Program Renja SKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Capaian Program Renja SKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Pelaksanaan SKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	60	307,550,000	1	53,562,500	12	91,550,000	12	90,920,000	100	99.31	12	54,000,000	100	168.37	Sekcam
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	500	392,745,000	100	103.440.000	100	98,785,000	100	98,785,000	100	100.00	100	73,490,000	100	134.42	Camat
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	50	194,150,000	1	38,830,000	10	38,830,000	10	38,830,000	100	100.00	10	38,830,000	100	100.00	Camat
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	2	150,000,000	1	54,950,000	2	50,000,000	2	50,000,000	100	100.00	2	25,000,000	100	200.00	Camat
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	50	48,595,000	1	9,660,000	10	9,955,000	10	9,955,000	100	100.00	10	9,660,000	100	103.05	Camat
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	500	362,180,000	100	60.289.000	100	72,436,000	100	71,386,000	100	98.55	100	72,436,000	100	98.55	Camat
		7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	500	95,610,000	100	7,600,000	100	19,122,000	100	19,122,000	100	100.00	100	19,122,000	100	100.00	PMD
		7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrenbang Kecamatan)	Kali	5	95,610,000	100	7,600,000	1	19,122,000	1	19,122,000	100	100.00	1	19,122,000	100	100.00	PMD
		7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%	500	266,570,000	100	52,689,000	100	53,314,000	12	52,264,000	12	98.03	100	53,314,000	12	98.03	Yanmum
		7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	bulan	60	266,570,000	100	52,689,000	12	53,314,000	12	52,264,000	100	98.03	12	53,314,000	100	98.03	Yanmum

No	Kode	Program/Kegiatan	Satuan	TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA HINGGA 31/12/2021				TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA HINGGA 31/12/2022						REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN RENSTRA HINGGA 31/12/2022				Pelaksana
				Target Kinerja Capaian (Renstra SKPD) Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2021		Target Kinerja Capaian Program Renja SKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Capaian Program Renja SKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Pelaksanaan SKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																
Sasaran-2 : Meningkatkan kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan																		
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	500	1,938,059,000	100	361.392.600	100	359,955,000	12	359,199,000	12	99.79	100	394,526,000	12	91.05	Camat
		7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	500	174,148,000	100	41,585,000	12	7,808,000	100	7,808,000	100	100.00	100	41,585,000	100	18.78	Yanmum
		7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bulan	60	174,148,000	100	41,585,000	12	7,808,000	12	7,808,000	100	100.00	12	41,585,000	100	18.78	Yanmum
		7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	500	1,763,911,000	100	319.807.600	100	352,147,000	100	351,391,000	100	99.79	100	352,941,000	100	99.56	Lurah
		7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Paket	15	1,609,528,000	100	296,557,600	3	290,764,000	3	290,008,000	100	99.74	3	329,691,000	100	87.96	Lurah
		7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Bulan	60	154,383,000	100	23,250,000	12	61,383,000	12	61,383,000	100	100.00	12	23,250,000	100	264.01	Lurah
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persen	500	45,750,000	100	40,505,400	100	9,150,000	100	9,150,000	100	100.00	100	9,150,000	100	100.00	Camat
		7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen	500	45,750,000	100	40,505,400	100	9,150,000	100	9,150,000	100	100.00	100	9,150,000	100	100.00	Trantib
		7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	5	45.750.000	5	40,505,400	1	9,150,000	1	9,150,000	100	100.00	1	9,150,000	100	100.00	Trantib

No	Kode	Program/Kegiatan	Satuan	TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA HINGGA 31/12/2021				TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA HINGGA 31/12/2022						REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN RENSTRA HINGGA 31/12/2022				Pelaksana
				Target Kinerja Capaian (Renstra SKPD) Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2021		Target Kinerja Capaian Program Renja SKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Capaian Program Renja SKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Pelaksanaan SKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	500	81,825,000	-	-	100	11,514,000	100	11,514,000	100	100.00	100	16,365,000	100	70.36	Camat
		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	500	81,825,000	-	-	100	11,514,000	100	11,514,000	100	100.00	100	16,365,000	100	70.36	Trantib
		7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	kegiatan	5	81,825,000	-	-	1	11,514,000	1	11,514,000	100	100.00	1	16,365,000	100	70.36	Trantib
		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	500	28,245,000	100	5.649.000	100	5,649,000	100	5,649,000	100	100.00	100	5,649,000	100	100.00	Camat
		7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	500	28,245,000	100	5.649.000	100	5,649,000	100	5,649,000	100	100.00	100	5,649,000	100	100.00	Tapem
		7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Desa	60	28,245,000	100	5.649.000	12	5,649,000	12	5,649,000	100	100.00	12	5,649,000	100	100.00	Tapem

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Grobogan

Sesuai dengan Keputusan Camat Grobogan nomor tahun 2022 Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan memiliki 2 IKU (Indikator Kinerja Utama), yaitu:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

Capaian kinerja indikator sasaran tersebut secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN GROBOGAN KABUPATEN GROBOGAN

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan Grobogan	B (75,70)	B (76,70)	B (77,20)	B (77,70)	B (78,20)	B (79,70)	B (82,50)	B (82,70)	B (82,80)	B (82,90)
2	Nilai Sakip Kecamatan Grobogan	B	B (65)	B (68)	BB (70)	BB (72)	BB (73,5)	B	B (63,27)	B (69,00)	B (71,00)

Realisasi masing-masing Indikator Kinerja Utama diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Realisasi perolehan skor SAKIP Pemda tahun 2021 dengan kategori B diperoleh berdasarkan hasil penilaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas tingkat akuntabilitas /pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*)..

Nilai evaluasi dikelompokkan dalam skor/skala prestasi capaian kinerja sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuskan
2	A	> 80 - 90	Memuaskan, memimpin perubahan, pekerja tinggi dan sangat akuntabel
3	BB	> 70 - 80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal
4	B	> 60 - 70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan atau perlu sedikit perbaikan.
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	> 30 - 50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistim untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	> 0 - 30	Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerpapan manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Sebagai perbandingan kami tampilkan hasil evaluasi SAKIP Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2019 dan 2020 dengan predikat B yang menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Grobogan sudah menunjukkan hasil yang baik namun masih tetap memerlukan perbaikan.

Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen yang dinilai		Bobot	Nilai tahun	Nilai tahun
			2019	2020
A	Perencanaan Kinerja	30	20,62	21,00
B	Pengukuran Kinerja	25	16,57	16,62
C	Pelaporan Kinerja	15	9,36	9,52
D	Evaluasi Internal	10	6,06	6,16
E	Capaian Kinerja	20	8,26	9,11
Nilai Hasil Evaluasi		100	60,87	62,41
Tingkat	Akuntabilitas		B	B
Kinerja				

Sedangkan untuk kecamatan Grobogan bersama 18 kecamatan lainnya untuk saat ini belum dinilai oleh Kabupaten sehingga belum bisa mengisi capaian nilai/skor penilaian SAKIP dari Kabupaten. Namun upaya memperbaiki kinerja pelayanan di jajaran Kecamatan Grobogan telah dilakukan dalam rangka bentuk tanggung jawab ikut menyukseskan agenda reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan diantaranya adalah :

- 1) Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder);

- 2) Secara rutin dilakukan evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam rentang waktu triwulanan dan tahunan;
- 3) Adanya penilaian setiap tahun dari Kementerian Dalam Negeri terhadap SAKIP Pemda telah memacu seluruh stakeholder SAKIP untuk terus berbenah dalam rangka menuju *result oriented goverment*.

Faktor penghambat dalam pencapaian nilai SAKIP ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penyampaian data dukung dari masing-masing seksi dan subbag sedikit terlambat; dan
- 2) Belum adanya aplikasi yang integrated antara keuangan dan kinerja agar memudahkan proses dari sejak perencanaan hingga pelaporannya.

- b. Nilai /skor survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public yang telah dilakukan oleh Pemda merupakan skor survey yang diperoleh oleh OPD yang menjadi obyek pelaksanaan survey kepuasan masyarakat.

Indikator ini pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 76,70 sementara realisasinya sebesar 82,70 melampaui target yang telah ditetapkan.

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan perencanaan, monitoring, dan evaluasi pencapaian target nilai kepuasan masyarakat secara terukur dan konsisten;
- 2) Melakukan sosialisasi optimalisasi pelayanan publik; dan
- 3) Komitmen kepala dan personil unit kerja yang kuat.

Faktor penghambat dalam pencapaian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Belum adanya mekanisme reward and punishment yang baku untuk memacu percepatan peningkatan kualitas pelayanan public di jajaran pemerintah Kabupaten Grobogan; dan
- 2) Pelaksanaan survey masih bersifat sampel dan belum seluruh masyarakat yang dilayani ikut berpartisipasi.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Grobogan

Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Grobogan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a) Permasalahan Sekretariat
 - 1) Kurangnya jumlah Personil dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan;
 - 2) Kurang memadainya sarana prasarana yang mendukung kegiatan di Kecamatan;
 - 3) Kurangnya kompetensi yang dimiliki personil dalam menjalankan tugas dan fungsi;
 - 4) masih kurangnya pengelolaan data dan pengarsipan dokumen.
- b) Permasalahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 1) menurunnya kesadaran gotong-royong masyarakat;
 - 2) keterlambatan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa.
- c) Permasalahan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Kurangnya Kepatuhan masyarakat terhadap implementasi Peraturan Daerah;
 - 2) Kurangnya kelengkapan sarana pendukung dalam operasional penegakan Peraturan Daerah;
 - 3) Kurangnya peningkatan Kapasitas dan Ketrampilan anggota Satlinmas yang ada di Masyarakat.
- d) Permasalahan Kesejahteraan Rakyat
 - 1) kurangnya Koordinasi dalam penyediaan data Kesejahteraan Sosial.
- e) Permasalahan Seksi Pelayanan Umum
 - 1) Belum optimalnya penerapan SOP maupun SPP dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
 - 2) Kurangnya sarana pendukung yang responsif terhadap perempuan, lansia, dan difabel.
- f) Permasalahan Seksi Tata Pemerintahan
 - 1) Kurangnya sosialisasi kepada Perangkat Desa terkait penyusunan APBDes dan Laporan Petanggungjawaban APBDes;
 - 2) Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dengan pemerintah desa dalam intensifikasi PBB.

Berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah maka isu-isu strategis Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan dapat dibagi menjadi beberapa isu utama, yaitu :

1. Isu terkait penyelenggaraan pemerintahan.
 - a. Belum lengkapnya sarana dan prasarana pendukung;
 - b. Kurangnya personel menjadikan banyaknya fungsi yang dirangkap sehingga output kinerja juga kurang maksimal;
 - c. Perlunya integrasi system dan data;
 - d. Koordinasi antar fungsi masih perlu ditingkatkan lagi.
2. Isu terkait perekonomian dan pengendalian pembangunan
 - a. Belum Optimalnya verifikasi dan SPI (Sistem Pengendalian Internal);
 - b. Belum semua unit memahami sistem pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan.
3. Isu terkait pelayanan publik
 - a. Reformasi Birokrasi belum dilaksanakan secara menyeluruh (komprehensif) di semua unit pelayanan;
 - b. Masih perlunya sosialisasi kepada masyarakat maupun ASN terkait hak dan kewajiban masing-masing dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan adalah Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu didukung dengan program dan kegiatan.

Review terhadap rancangan awal RKPD adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan yang sudah disusun dalam rancangan awal RKPD sesuai dengan kebutuhan riil Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan. Hasil review tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kecamatan Grobogan Kab.Grobogan

4.608.844.134

No		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2024		Hasil Analisis Kebutuhan 2024	
					Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif
						Rp		Rp
1		2	3	4	5	6	7	8
1.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	70		70	
			Laporan Keuangan Sesuai SAP	%	100		100	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	%	100		100	
			Presentase Pemenuhan Area Penilaian Manejemen Resiko	%	60		60	
	1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	%	100	21,646,000	100	21,646,000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	1	21,646,000	1	21,646,000
	1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	%	100	3,069,186,134	100	3,069,186,134
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	bulan	14	3,069,186,134	14	3,069,186,134
	1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik	-	-	-	-	-
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	-	-	-	-	-
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dimanfaatkan	-	-	-	-	-
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah peserta Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-
	1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	%	100	80.000.000	100	80.000.000
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	paket	1	40.000.000	1	40.000.000
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	-	-	-	-
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	24	40.000.000	24	40.000.000
	1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	410,000,000	100	410,000,000

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket	10	40,000,000	10	40,000,000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	unit	-	-	-	-
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	paket	1	30,000,000	1	30,000,000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket	10	100,000,000	10	100,000,000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	paket	10	20,000,000	10	20,000,000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	dokumen	36	10,000,000	36	10,000,000
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	paket	10	100,000,000	10	100,000,000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	110,000,000	12	110,000,000
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sarana penunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang diadakan	unit	-	-	-	-
	1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	%	100	80,000,000	100	80,000,000
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	unit	-	-	-	-
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	unit	-	-	-	-
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	unit	3	30,000,000	3	30,000,000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	unit	-	-	-	-
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan	unit	-	-	-	-
		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan	unit	-	-	-	-
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	unit	-	-	-	-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	unit	4	50,000,000	4	50,000,000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	unit	-	-	-	-
	1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	299,560,000	100	299,560,000
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia	laporan	12	80,000,000	12	80,000,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	laporan	12	29,560,000	12	29,560,000
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan	12	190,000,000	12	190,000,000

1.8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%	100	161,350,000	100	161,350,000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara	unit	10	51,850,000	10	51,850,000
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	unit	-	-	-	-
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	unit	-	-	-	-
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya terpelihara	unit	-	-	-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	unit	1	100,000,000	1	100,000,000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	unit	4	9,500,000	4	9,500,000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	unit	-	-	-	-
2		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	%	100	60,055,000	100	60,055,000
2.1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang menghasilkan rekomendasi	%	-	-	-	-
		7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrenbang Kecamatan)	Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan	Kali	-	-	-	-
2.2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilakukan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	%	-	-	-	-
		7.01.02.2.02.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen pelayanan yang disusun (SOP, SPP, Maklumat Pelayanan, Inovasi, dsb)	Dok	-	-	-	-
		7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah indikator SPM yang didata	Indikator	-	-	-	-
		7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersusunnya dokumen SKM	Dok	-	-	-	-
2.3		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan	%	100	60,055,000	100	60,055,000
		7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah perizinan non usaha yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan	Jenis	-	-	-	-
		7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah urusan pemerintahan non perizinan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	Jenis	-	-	-	-
		7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan	laporan	12	60,055,000	12	60,055,000

3		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	Persen	100	382.047.000	100	382.047.000
	3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan koordinasi pemberdayaan desa	%	100	9,900,000	100	9,900,000
		7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan pemantauan Musrenbangdes	Desa	-	-	-	-
		7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (PKK, UMKM, Produk Unggulan, Wisata Unggulan dsb)	laporan	1	9,900,000	1	9,900,000
	3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang mendapatkan pembinaan	%	100	352,147,000	100	352,147,000
		7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	unit	3	257,650,000	3	257,650,000
		7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan (PKK, UMKM, Produk Unggulan, Wisata Unggulan dsb)	Ormas/ pokmas	5	94,497,000	5	94,497,000
4		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	persen	-	-	-	-
	4.1	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pemenuhan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen	-	-	-	-
		7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi Forkompimcam	Kegiatan	-	-	-	-
		7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan koordinasi FKUB	Kegiatan	-	-	-	-
	4.2	7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	jumlah kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	kegiatan	-	-	-	-
		7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan patroli penertiban trantibum	kegiatan	-	-	-	-
5		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	100	30,000,000	100	30,000,000
	5.1	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	100	30,000,000	100	30,000,000

		7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	kegiatan	1	3,000,000	1	3,000,000
		7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti bintek, sosialisasi, konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	-	-	-	-
6		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	100	15,000,000	100	15,000,000
	6.1	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	100	15,000,000	100	15,000,000
		7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kegiatan	-	-	-	-
		7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Desa	12	15,000,000	12	15,000,000
		7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa	-	-	-	-
		7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	-	-	-	-
		7.01.06.2.01.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Desa	-	-	-	-
		7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah BPD yang dibina	BPD	-	-	-	-
		7.01.06.2.01.12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Masyarkat Yang Difasilitasi Tupoksinya	Lembaga	-	-	-	-
		7.01.06.2.01.14 Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama (antar Desa dan Pihak Ketiga)	Desa	-	-	-	-
		7.01.06.2.01.16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan	-	-	-	-
						4,608,844,134		4,608,844,134

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan yang menjadi Acuan/Pedoman

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka tema pembangunan daerah pada tahun 2024 yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2024 yaitu: **“Penguatan daya saing SDM, didukung peningkatan reformasi birokrasi”**. Pembangunan tetap berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Penguatan tata kelola pemerintahan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi mulai dijadikan prioritas, selain tetap meneruskan pembangunan infrastruktur. Penguatan reformasi birokrasi mengedepankan pada pencapaian sasaran-sasaran yang ada, yakni akuntabilitas, kapabilitas dan pelayanan prima. Hal tersebut dilakukan dengan peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengawasan, peningkatan kompetensi ASN, serta meningkatkan mutu pelayanan publik didukung dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Kebijakan prioritas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini meliputi :

- 1) Pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan;
- 2) Penguatan kelembagaan dan pelayanan perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat;
- 3) Peningkatan mutu layanan kesehatan terutama pada pelayanan kesehatan primer (primary health care);
- 4) Peningkatan sarana prasarana kegiatan fisik dalam mendukung Germas dan pemenuhan kebutuhan/cadangan pangan yang bergizi dan seimbang;
- 5) Peningkatan kualitas pelayanan KB dan optimalisasi program Generasi Terencana;

- 6) Percepatan pemenuhan anggaran responsif gender dan anak guna menyelesaikan isu strategis gender yang ada;
- 7) Penguatan daya dukung pelayanan publik yang prima;
- 8) Pengembangan smart government dalam menunjang pengembangan smart city;
- 9) Penguatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan;
- 10) Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen ASN.

Sedangkan bila dilihat dari sasaran pembangunan Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebagaimana teruraikan dalam table 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1
Sasaran Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2024

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	12,34 tahun
		Rata-rata lama Sekolah	7,04 tahun
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	75,14 tahun
3	Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	Tingkat Capaian APE	Madya (0,6375 – 0,7724)
4	Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumberdaya air kondisi baik	87,22%
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	92,34%
		Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	76,07 %
		Kinerja Lalu Lintas (V/C ratio)	B (0,20- 0,44)
5	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3	Indeks Kualitas Air	Indeks 80,10

		Indeks Kualitas Udara	Indeks 87,15
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks 62,75
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks 46,00
6	Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks 0,68
7	Meningkatnya Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,23 %/tahun
		Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	0,5 %/tahun
		Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	1,59 %/tahun
		Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	1,47 persen
8	Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	Nilai investasi di daerah	870,467 Milyar Rupiah
9	menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	Indeks Desa Membangun	Indeks 0,70
10	Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan PPKS	1,4 %/tahun
11	Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,2 %
12	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	Rata-rata nilai IKM	Kategori B (77,70)
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks Sangat Inovatif
13	Meningkatnya penerapan egovernment yang terintegrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks 3,3
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan	Nilai SAKIP	Nilai B (70)
		Level Maturitas SPIP	Level 3 (3,1)
		Opini BPK	Opini WTP
		Indeks sistem merit	Kategori III (250)
13	Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah	Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	73,85 %

14	Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	Persentase Toleransi antar umat beragama	100%
		Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	100%

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Grobogan

3.2.1. Tujuan

Berpedoman pada tujuan dalam Renstra Kecamatan Grobogan dan menyesuaikan dengan aturan Permendagri No. 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Kecamatan Grobogan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Bupati nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian, Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kecamatan maka tujuan Renja Kecamatan Grobogan tahun 2024 adalah :

“ Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan ”

3.2.2. Sasaran

Berpedoman pada sasaran dalam Renstra Kecamatan Grobogan dan menyesuaikan dengan aturan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka sasaran Renja Kecamatan Grobogan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Sasaran Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Nilai IKM	Nilai B (77,70)
2	Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP (Penilaian tim Kabupaten)	BB (70)

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1. Penjabaran Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Pada tahun 2024 dengan berpedoman pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Kecamatan Grobogan akan melaksanakan 6 program, 13 kegiatan, dan 26 sub kegiatan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

**4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2023 dan Prakiraan Maju 2024**

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Penyediaan Bahan/Material;
 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Pengadaan Mebel;
 2. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.
- 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
 - b) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;
 - 2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
 - c) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
 - 1. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
- 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Secara rinci rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Grobogan tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan
Kegiatan Perangkat Daerah Tahun
2023 dan Prakiraan Maju 2024
Kecamatan Grobogan

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
						target	Rp	target	Rp
KECAMATAN GROBOGAN							3.560.331.728		4.608.844.134
Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat		Nilai IKM			77,20		77,70	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai SAKIP	Nilai	68	3.083.039.728	70	4.121.742.134
			Laporan Keuangan Sesuai SAP		%	100		100	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah		%	100		100	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
						targ et	Rp	targ et	Rp
			Presentase Pemenuhan Area Penilaian Manejemen Resiko		%	40		60	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas dibagi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dikali 100	%	100	-	100	21.646.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun			1	-	1	21.646.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100	%	100	2.379.659.728	100	3.069.186.134

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
						targ et	Rp	targ et	Rp
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN		bulan	14	2.379.659.728	14	3.069.186.134
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah dokumen administrasi kepegawaian dikali 100	%	100	66.627.000	100	80.000.000
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		buah	72	22.380.000	30	40.000.000
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		orang	30	44.247.000	24	40.000.000

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
						targ et	Rp	targ et	Rp
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100	%	100	327.347.000	100	410.000.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		unit	35	12.000.000	10	40.000.000
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		unit	3	14.754.000	1	30.000.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan		unit	12	101.995.000	10	100.000.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		unit	12	15.670.000	10	20.000.000

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
						target	Rp	target	Rp
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		bulan	12	8.640.000	36	10.000.000
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan		bulan	12	72.322.000	10	100.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		bulan	12	101.966.000	12	110.000.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100	%	100	16.896.000	100	80.000.000
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan		unit	-	-	3	30.000.000

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
						targ et	Rp	targ et	Rp
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan		unit	3	16.896.000	2	40.000.000
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun		unit	-	-	1	10.000.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100	%	100	211.160.000	100	299.560.000
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia		bulan	12	77.600.000	12	80.000.000

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
						targ et	Rp	targ et	Rp
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		bulan	12	29.560.000	12	29.560.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor		bulan	12	104.000.000	12	190.000.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dibagi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100	%	100	81.350.000	100	142.869.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara		unit	10	51.850.000	10	51.850.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara		unit	2	20.000.000	1	100.000.000

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
						targ et	Rp	targ et	Rp
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara		unit	10	9.500.000	4	9.500.000
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	Jumlah dan jenis layanan di kecamatan yang sudah menggunakan SOP tetap dibagi jumlah jenis layanan yang ada di kecamatan dikali 100	%	100	81.701.000	100	60.055.000
		7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang menghasilkan rekomendasi	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang mendapatkan rekomendasi dibagi banyaknya kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dikali 100	%	100	21.646.000	-	-
		7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrenbang Kecamatan)	Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan		Kali	1	21.646.000	-	-

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
						targ et	Rp	targ et	Rp
		7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan dibagi jumlah yang dilimpahkan dikali 100	%	100	60.055.000	100	60.055.000
		7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan		Laporan	12	60.055.000	12	60.055.000
	Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah lembaga masyarakat aktif dibagi jumlah lembaga masyarakat (Kecamatan dan Kelurahan/Desa) dikali 100	Persen	100	362.047.000	100	382.047.000
		7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan koordinasi pemberdayaan desa	Jumlah pelaksanaan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah pelaksanaan koordinasi pemberdayaan masyarakat dikali 100	Persen	100	9.900.000	100	9.900.000

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
						targ et	Rp	targ et	Rp
		7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (PKK, UMKM, Produk Unggulan, Wisata Unggulan dsb)		Laporan	1	9.900.000	1	9.900.000
		7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana kelurahan hasil pemberdayaan masyarakat dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan hasil pemberdayaan masyarakat dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana hasil pemberdayaan masyarakat dikali 100	persen	100	352.147.000	100	352.147.000
		7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Unit	3	257.650.000	3	257.650.000
		7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Lembaga/ ormas	4	94.497.000	5	94.497.000

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
						targ et	Rp	targ et	Rp
		7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dibagi jumlah keluarga di Kec Grobogan di kali 100	persen	-	-	100	20.000.000
		7.01.03.2.06.06 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		keluarga	-	-	24	20.000.000

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
						targ et	Rp	targ et	Rp
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	Jumlah Linmas (di Kecamatan dan Desa/Kelurahan) aktif dibagi jumlah Linmas (di Kecamatan dan Desa/Kelurahan) Aktif	Persen	100	9.200.000	-	-
		7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pemenuhan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dikali 100	persen	100	9.200.000	-	-
		7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi Forkompimcam		Kegiatan	1	9.200.000	-	-

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
						targ et	Rp	targ et	Rp
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dibagi jumlah kelompok masyarakat di tingkat kecamatan dikali 100	persen	100	19.992.000	100	30.000.000
		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dibagi jumlah kelompok masyarakat di tingkat kecamatan dikali 100	Persen	100	19.992.000	100	30.000.000

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
						targ et	Rp	targ et	Rp
		7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional		kegiatan	1	19.992.000	1	30.000.000
		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tertib administrasi	Jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah seluruh desa di kecamatan dikali 100	persen	100	4.352.000	100	15.000.000
		7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	Jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah seluruh desa di kecamatan dikali 100	%	100	4.352.000	100	15.000.000
		7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		dokumen	12	4.352.000	1	15.000.000

BAB V

PENUTUP

2.1. Catatan Penting

Rancangan Awal Rencana Kerja adalah dokumen awal perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Rancangan Awal Renja Kecamatan Grobogan Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 dan berpedoman pada Renstra Kecamatan Grobogan tahun 2021-2026.

Rancangan Awal Renja Kecamatan Grobogan Tahun 2023 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja program kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Untuk tahun 2024 Renja Kecamatan Grobogan terdiri dari 6 program, 13 kegiatan, dan 26 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp4.608.844.134,00 (Empat Milyar Enam Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah).

Rancangan Awal Renja Kecamatan Grobogan Tahun 2024 selanjutnya menjadi pedoman awal yang pada tahapan selanjutnya akan disempurnakan lagi menjadi Rancangan Renja dan terakhir menjadi Renja yang bermanfaat bagi Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024.

2.2. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya mental, semangat, kejujuran, dan disiplin pada pelaku pembangunan yang tetap harus dikedepankan.

2.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mencapai target sasaran Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan yang telah ditetapkan pada tahun 2024 maka perlu didukung dengan program dan kegiatan. Agar program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas.

CAMAT GROBOGAN



SUPRPTI,S.Sos.,MM
NIP.19690724 199403 2 004